



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Diplomasi Publik AS Melalui Program Peace Corps Dalam
Meningkatkan Pemahaman Bersama Terhadap Indonesia**

Skripsi

Oleh

Nathasya Giovana

2013330116

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Diplomasi Publik AS Melalui Program Peace Corps Dalam
Meningkatkan Pemahaman Bersama Terhadap Indonesia**

Skripsi

Oleh

Nathasya Giovana

2013330116

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Ph. D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Nathasya Giovana
Nomor Pokok : 2013330116
Judul : Diplomasi Publik AS Melalui Program Peace Corps Dalam
Meningkatkan Pemahaman Bersama Terhadap Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 7 Februari 2018
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M. S.

:

Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Ph. D

:

Anggota

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nathasya Giovana

NPM : 2013330116

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Diplomasi Publik AS Melalui Program Peace Corps Dalam Meningkatkan Pemahaman Bersama Terhadap Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila di masa yang akan datang diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Maret 2018



Nathasya Giovana

ABSTRAK

Nama: Nathasya Giovana

NPM: 2013330116

Judul: Diplomasi Publik AS Melalui Program Peace Corps Dalam Meningkatkan Pemahaman Bersama Terhadap Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barrack Obama. Diplomasi publik yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen pendidikan, yaitu melalui kerjasama komprehensif yang berfokus terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan program tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan menciptakan pemahaman bersama antara masyarakat Amerika Serikat dengan masyarakat Indonesia. Diplomasi publik Amerika Serikat melalui program Peace Corps bertujuan untuk menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai antara relawan dengan masyarakat Indonesia.

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif, maka penulis menggunakan konsep diplomasi multi jalur yang meliputi jalur non-pemerintahan, masyarakat, pendidikan, pendanaan, serta media dan komunikasi, untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi ini “*Bagaimana Diplomasi Publik AS melalui implementasi-implementasi program Peace Corps dalam meningkatkan pemahaman bersama?*” Untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai sumber data. Sehingga data yang didapatkan dan didukung oleh konsep akan menghasilkan analisis yang menjawab pertanyaan penelitian.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Diplomasi Publik, Indonesia, Peace Corps

ABSTRACT

Name: Nathasya Giovana

NPM: 2013330116

Title: U.S. Public Diplomacy Through the Peace Corps Program to Increase Mutual Understanding Towards Indonesia

This research aims to discuss how the implementation of the United States public diplomacy during the reign of Barrac Obama. The implementation of the United States public diplomacy is to use the instrumen of education, namely through Peace Corps program, United States public diplomacy is realized through a comprhensive partnership that focuses on the quality enhancement of education in Indonesia. The United States goverment use the program as a means to enhance bilateral cooperation and create a shared understanding between the American society and Indonesian society. United States public diplomacy through the Peace Corps program aims to create a mutual understanding and appreciate between volunteers and the Indonesia society.

*To deliver a research as comprehensive as possible, thus the author resorts to the concepts of multitrack diplomacy that includes a line of non-governmental, community, education, funding, media and communication, these concepts are bound to answer the research question, **“How is the U.S. Public Diplomacy through implementations of Peace Corps program to Increase Mutual Understanding?”** To bolstrer the answer of the research question, the author conducts this research with qualitative method. Documentary research and interview with speaker also serve as the data source. Hence the data discovered and supported by the concepts could provide a deep analysis which answers the research question.*

Keywords: United States, Public Diplomacy, Indonesia, Peace Corps

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul

Diplomasi Publik AS Melalui Program Peace Corps Dalam Meningkatkan Pemahaman Bersama Terhadap Indonesia. Diplomasi Publik AS dilakukan melalui program *Peace Corps* di Indonesia dengan menggunakan pendidikan sebagai instrumen dalam menciptakan serta meningkatkan *mutual understanding* antara dua negara. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu Sukawarsini Djelantik, Ph. D selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Bandung, 1 Maret 2018

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Dan untuk setiap kata yang tak dapat diungkapkan hanya rasa syukur dan terima kasih yang saya dapat ucapkan kepada keluarga dan pihak – pihak yang mendukung penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Sukawarsini Djelantik, Ph. D selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini, terima kasih atas segala saran dan kritiknya yang sangat membangun demi kepentingan penyelesaian penelitian ini. Dan juga penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan segala nasihat – nasihat beliau yang sangat bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Sugiyanto selaku Humas Peace Corps dan Bapak Andreza S. Dasuki selaku sekretaris Kementerian Luar Negeri Direktorat Amerika I, yang membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
3. Sahabat-sahabat saya tercinta yang selalu mendukung saya dibandung yaitu, Gayatri Grace, Jason Januar, Syahreza, Ari, Carol, Hyunsong, Alya, Shinta, Alamsyah Ibrahim serta adik saya Bella Taruna. Kemudian Sahabat saya dibali, Ayako Dwiyani, Vita Vebrya, Evangelista Pangkahila, Dyah Devita, Nabila Umar, Ican Armani, Kevin, Sabine dan Rico. Saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya telah mendukung saya disaat sedih maupun senang.
4. Devito pulungan my best partner, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena selalu ada 24/7 menemani saya menghadapi semua permasalahan. I'm lucky to have you.
5. Wanita paling spesial dalam hidup saya, Mama. Terimakasih Mama telah mendukung saya dalam semua kesulitan dan tidak pernah menyerah atas apapun. Saya beruntung memiliki seorang ibu seperti dia, yang selalu berusaha membuat yang terbaik untuk saya. I love you mom.
6. Almarhum Ayahanda Saya. Saya mengucapkan terimakasih untuk laki-laki yang paling saya cintai. Karena, Beliau selalu mendukung setiap langkah saya, walaupun beliau tidak sempat menemani saya sampai akhir perkuliahan saya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.2.1 Pembatasan Masalah	12
1.2.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.3.1 Kegunaan Penelitian	13
1.4 Kajian Literatur	14
1.5 Kerangka Pemikiran	20
1.6 Metodologi Penelitian.....	27
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	27
1.7 Sistematika Pembahasan	27
BAB II	29
2.1 Pendidikan di Indonesia	29
2.2 Hambatan-Hambatan dalam Proses Pendidikan	35
2.2.1 Anggaran Biaya Pendidikan	35
2.2.2 Tenaga Kependidikan	37
2.2.3 Kurikulum	38

2.2.4	Sarana dan Prasarana	39
2.3	Kebijakan dalam Bidang Pendidikan	40
2.3.1	Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	41
2.3.2	Masa Pemerintahan Joko Widodo	45
2.4	Upaya-upaya Peningkatan Mutu Pendidikan	47
BAB III		55
3.1	Program Peace Corps di Jawa Barat	56
3.2	Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan non-formal	66
3.2.1	Program English Club	67
3.2.2	Program Student Friendly School	68
3.2.3	Kegiatan Pre-service Training	70
3.3	Penyelenggaraan Kegiatan Sosial	72
BAB IV.....		74
DAFTARPUSTAKA		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Skema Sembilan Jalur dalam Diplomasi Multijalur	22
Gambar	2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	49
Gambar	3.1	Foto Guru dan Relawan Peace Corps	75
Gambar	3.1.1	Kegiatan Peace Corps	60
Gambar	3.2	Foto Relawan dalam Kegiatan SFS	65
Gambar	3.2.3	Foto Relawan dan Guru dalam Kegiatan PST	68

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi
AMH	Anugrah Media Humas
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of South East Asia Nations
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BSM	Bantuan Siswa Miskin
GEM	Global Education Monitoring
ICT	Information and Communication Technologies
Itjen	Inspektorat Jenderal
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPS	Ilmu Pengetahuan Sosial
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jabar	Jawa Barat
Kemendikbud	Indonesia International Book Fair
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemenag	Kementerian Agama
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan

Kemenko	Kementerian Koordinator
KIB	Kabinet Indonesia Bersatu
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KKN	Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KL	Kementerian Lembaga
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LHE	Laporan Hasil Evaluasi
MA	Madrasah Aliyah
MEA	Masyarakat Ekonomi Asean
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MoU	Memorandum of Understanding
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PC	Peace Corps
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
Pemda	Pemerintah Daerah
PIP	Program Indonesia Pintar
PP	Peraturan Pemerintah
PST	Pre Service Training
Renstra	Rencana Strategi
RKB	Ruang Kelas Baru
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RPJMN	Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional

SBY	Susiolo Bambang Yudhoyono
SD	Sekolah Dasar
SDG	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
Setneg	Sekretariat Negara
SI	Standar Isi
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SKKNL	Standard Kompetensi Kerja Nasional
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPI	Sistem Pengendalian Intern
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Unesco	United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization
USB	Unit Sekolah Baru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses globalisasi kerjasama merupakan usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Ketergantungan antar negara mendorong adanya kerjasama *bilateral* maupun *multilateral*. Adanya keterkaitan antara *people* dan *government* dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi dari dalam negeri maupun luar negeri.¹ Peran diplomasi sangat diperlukan dalam menunjang kerjasama tersebut. Selain itu, untuk memberikan pertukaran informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain demi kepentingan nasional.²

Kepentingan nasional dapat diwujudkan dengan berbagai program dibawah pemerintahan maupun *non-pemerintahan*, salah satu upaya tersebut adalah diplomasi publik. Bentuk diplomasi yang ditawarkan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia merupakan suatu usaha untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus sebagai kerjasama *bilateral*. Salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh AS terhadap Indonesia adalah *Peace Corps*

¹Jackson, Robert "Introduction to International Relations: Theories and Approaches". Third edition. New York: Oxford University Press, 2007. hal 103

²Djelantik, S. 2008. Diplomasi Antara Teori dan Praktik: Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 14

(PC). PC merupakan badan pemerintah AS yang berdiri pada tahun 1961 yang di awal pembentukannya bertujuan untuk melakukan misi perdamaian dunia dan persahabatan ke seluruh dunia melalui layanan dari para relawan Amerika Serikat.

Tujuan pembentukan PC yang semula hanya dilaksanakan sebagai misi perdamaian, kemudian berkembang menjadi *mutual understanding* yaitu menciptakan serta meningkatkan pemahaman bersama antara masyarakat AS dengan masyarakat dunia lainnya. PC telah melayani 140 negara selama 50 tahun terakhir dan bekerjasama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, institusi pendidikan dan kesehatan, pengusaha, sekolah, jaringan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, pertanian, teknologi dan informasi serta lingkungan hidup.³

PC didirikan tahun 1961 pada masa pemerintahan Presiden AS, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy membentuk program PC karena ia menyadari pentingnya pengaruh negara terbelakang terhadap AS. Kennedy memiliki sebuah gagasan untuk memberikan bantuan dalam peningkatan terhadap negara-negara terbelakang. Untuk mengupayakan rencana tersebut, Kennedy membentuk PC sebagai suatu program uji coba dalam meningkatkan hubungan kerjasama AS dengan negara-negara lainnya, khususnya negara terbelakang. Dimulai tahun 1961 para relawan yang berasal dari AS sudah

³Peace Corps Volunteer Handbooks 2014, diakses dari http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/documents/volunteer_handbook.pdf, pada tanggal 30 Februari 2017

melakukan pelayanan sukarela ke berbagai negara, khususnya di Amerika Latin, Afrika, Asia dan Timur Tengah.⁴

Program PC pertama kali didirikan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama yang ditandatangani melalui *Memorandum of Understanding* pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963. Namun, program tersebut sempat terhenti pada tahun 1965 dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil. Program tersebut kembali dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2006 dengan melakukan pertemuan dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar AS menyampaikan penawaran terhadap Indonesia untuk melakukan pembentukan PC kembali. Pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2009 diadakannya sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri AS mengenai pembahasan *Comprehensive Partnership* serta mengenai kesiapan AS terhadap pengiriman kembali relawan-relawan PC ke Indonesia.⁵

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan AS dalam bentuk program PC dilakukan dalam kerangka kemitraan komprehensif yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama.⁶ Amerika Serikat berupaya untuk memperat hubungan antara masyarakat AS dengan masyarakat Indonesia yang direalisasikan dengan

⁴Kennedy establishes Peace Corps, diakses dari <http://www.history.com/this-day-in-history/kennedy-establishes-peace-corps> , pada tanggal 30 Februari 2017

⁵Laporan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia tahun 2015, diakses dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Peace%20Corps/Laporan%20Peace%20Corps%202015.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Peace%20Corps/Laporan%20Peace%20Corps%202015.pdf) pada tanggal 30 Februari 2017

⁶ Indonesia-AS sepakati kerjasama dan dialog antar-keyakinan, diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/165587/indonesia-as-sepakati-kerja-sama-dan-dialog-antar-keyakinan> tanggal 30 Februari 2017

pengiriman para relawan-relawan PC melalui pelatihan pengajaran Bahasa Inggris di berbagai sekolah maupun Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di daerah pelosok di Indonesia. Program PC yang direalisasikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan *mutual understanding* melalui implementasi-implementasi yang diterapkan dalam pengajaran Bahasa Inggris. Dalam Pelaksanaannya, PC berfokus terhadap *people to people contact* dengan menggunakan instrumen pendidikan, sehingga dapat tercapai pemahaman yang baik terhadap kedua belah pihak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Obama mengeluarkan sebuah gagasan *comprehensive partnertship* yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama *bilateral*, khususnya dalam bidang pendidikan. Dewasa ini, pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara. Namun, tidak dapat dipungkiri pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran dikarenakan terdapat hambatan dalam setiap pelaksanaannya. Hambatan tersebut mendorong Indonesia untuk terus berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan ada aspek yang perlu diperhatikan, antara lain sistem kurikulum, biaya pendidikan, dan fasilitas pendidikan.⁷

Dalam pembangunan suatu negara, pendidikan harus berperan dalam membangun seluruh potensi masyarakat untuk menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks demikian, pendidikan mempengaruhi

⁷Musyaddad Kholid, "Problematika Pendidikan di Indonesia". Edu-Bio, 2013, Vol. 4, Hal 51

seluruh aspek masyarakat yang mencakup sosial, budaya, ekonomi dan politik. Maka dari itu, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang dimulai dengan terbentuknya suatu kebijakan yang mendukung seluruh kegiatan dalam membangun pendidikan nasional.⁸

Melihat problematika yang ada mendorong pemerintah Indonesia untuk mendukung pembentukan program PC. Sejak tahun 2010 program tersebut mulai direalisasikan oleh para relawan-relawan PC ke Provinsi Jawa Timur, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2012 ke Provinsi Jawa Barat. PC tidak hanya memberikan pelatihan Bahasa Inggris pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) namun juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Disamping itu PC melakukan pengajaran Bahasa Inggris pada sekolah berbasis keagamaan atau sederajatnya yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Dengan diupayakannya PC di Indonesia dapat menjadikan suatu kerjasama yang menekankan prinsip terhadap kesetaraan posisi dari kedua belah pihak yaitu AS dengan Indonesia. Prinsip yang ditanamkan oleh kedua belah pihak telah dicantumkan dalam *Paris Declaration* dan *The Jakarta Commitmen*. Dengan dibentuknya PC diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat resiprokal terhadap kedua belah pihak.⁹

Selain sebagai kerjasama komprehensif yang menekankan prinsip kesetaraan posisi dari kedua belah pihak, program PC juga akan selalu ditinjau dan dilaporkan setiap perkembangannya dalam *Working Group Pro People*

⁸Suryana S, "Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan". Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013. Vol.2, Hal 7

⁹Laporan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia tahun 2015, op cit., hal 4

Initiative hal tersebut diupayakan untuk menciptakan kinerja yang berkualitas terhadap para relawan.¹⁰ Kinerja yang berkualitas dari para relawan akan menciptakan suatu *mutual understanding* diantara masyarakat Indonesia dengan AS bukan hanya dalam pengajaran Bahasa Inggris namun lebih menekankan terhadap *people to people contact*. Disamping itu para calon relawan yang tidak memiliki pengalaman mengajar, dapat dipertimbangkan untuk bertugas sebagai relawan. Kemudian, akan dilakukan pemantauan terhadap perkembangan para calon relawan selama mengikuti *Pre Service Training* (PST) di sekolah-sekolah maupun Madrasah.¹¹

Relawan PC tidak sepenuhnya ikut serta dalam penanganan permasalahan yang ada di dalam sekolah maupun *Madrasah*. Namun para relawan akan melakukan upaya-upaya dalam peningkatan sistem edukasi yang sebelumnya sudah terbentuk. Relawan PC akan turut bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam peningkatan sistem pendidikan, dengan memperkenalkan metodologi-metodologi baru disetiap pengajaran yang diterapkan di setiap sekolah. Para relawan juga mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).¹²

PC merupakan sebuah lembaga dibawah pemerintahan yang bersifat transparan serta bekerja sesuai dengan kode etik. Oleh karena itu para relawan lebih mengutamakan layanan *non-profit*, tanpa mengambil keuntungan personal dari situasi negara dengan menggunakan status perdamaian. Kode

¹⁰ Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2014*. (Bappenas:Jakarta).

¹¹Laporan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia tahun 2015, op.,cit hal 7

¹²No title, diakses dari handbook Kementerian luar negeri direktorat Amerika I, hal 7

etik seorang relawan tidak diperkenankan untuk membuka peluang bisnis dan memiliki saham yang bersifat komersial dengan negara lain. Kode etik yang diterapkan oleh pemerintah AS bertujuan untuk mencegah kegiatan yang dapat menguntungkan relawan secara sepihak. Adapun kegiatan-kegiatan terkait pelanggaran kode etik, akan diberikan sanksi oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah AS. Oleh karena itu para relawan diharapkan bekerja sesuai kode etik dan bersikap profesional disetiap bidangnya¹³

Selain memberikan pengajaran Bahasa Inggris, para relawan ikut berkontribusi dalam memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler untuk para murid SMP, SMA, SMK dan *Madrasah Tsanawiyah* maupun *Aliyah*. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara murid dengan guru. Demi meningkatkan prestasi akademik siswa para relawan tidak hanya melakukan peningkatan terhadap sistem mutu pendidikan, namun akan dilakukan peningkatan terhadap sistem praktek pengajaran terhadap guru-guru.¹⁴

PC direalisasikan sebagai bentuk program yang bersifat terbuka sertajujur dalam setiap program maupun sistem-sistem yang telah diproyeksikan sebelumnya, hal ini diimplementasikan dalam upaya peningkatan sistem kinerja maupun bentuk profesionalitas dari program PC. PC telah memperkenalkan beberapa inisiatif dalam memperkuat sistem kinerja, dengan melakukan evaluasi disetiap kinerjanya serta strategi yang bersifat transparan

¹³Ibid., hal 9

¹⁴Peace Corps: Performance and Accountability diakses dari, <http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/policies/annrept2015.pdf> hal 12, pada tanggal 30 Februari 2017

di setiap tingkat negara. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu kerjasama yang saling bermanfaat.¹⁵

Dengan adanya evaluasi disetiap program akan terbentuk suatu kinerja yang berkualitas terhadap para relawan. Program PC juga secara terbuka membangun jaringan kemitraan dengan organisasi-organisasi *non-profit* lainnya, hal ini dilakukan untuk memperluas hubungan domestik dengan tujuan mengatasi permasalahan nasional. Disamping itu, akan dilakukan inovasi baru disetiap kinerja demi mendapatkan hasil yang maksimal dari program PC yang telah terbentuk di Indonesia.¹⁶

PC berkomitmen untuk terus mendukung para relawan yang ditempatkan di daerah pelosok dan akan dilakukan pemantauan apabila terjadi kegiatan maupun tindakan yang bersifat kriminal yang dapat membahayakan para relawan. Dukungan ini direalisasikan dengan adanya suatu penegakan hukum yang diberikan oleh pemerintah AS maupun pemerintah Indonesia, hal ini menjadi jaminan yang kuat apabila para relawan mendapatkan suatu tindakan kriminal. Setiap kegiatan yang bersifat mengancam kriminalitas terhadap para relawan, segera mungkin akan ditindaklanjuti dibawah dasar hukum. Disamping itu selama pelatihan *pre-service* semua relawan akan menerima

¹⁵Handbook Kementerian luar negeri direktorat Amerika I, op cit., hal 22

¹⁶The Peace Corps A Comprehensive Agency Assesment diakses dari, http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/opengov/PC_Comprehensive_Agency_Assessment.pdf hal 14 , pada tanggal 30 Februari 2017

pelatihan tentang pelaporan yang berindikasi kriminalitas termasuk kekerasan seksual.¹⁷

Program PC yang direalisasikan dalam *comprehensive partnership* dilaksanakan sebagai suatu kerjasama antara AS dengan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional terhadap kedua belah pihak. Pemerintah AS mengharapkan dengan dilaksanakannya program PC dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Sedangkan, Pemerintah Indonesia melihat program PC sebagai bentuk kerjasama yang dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus sebagai pertukaran budaya antara AS-Indonesia. Maka dari itu, program PC memberikan memberikan keuntungan yang bersifat resiprokal.

1.2 Identifikasi Masalah

Kerjasama antara Indonesia dengan AS merupakan bentuk kerangka kerjasama komprehensif yang telah disepakati oleh Presiden Barack Obama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. *Comprehensive Partnership* telah direalisasikan dengan dibentuknya program *Peace Corps* di Indonesia. Presiden SBY menyadari diperlukannya suatu kerjasama komprehensif dengan AS untuk mengatasi permasalahan di Indonesia, khususnya dibidang pendidikan.¹⁸ Sedangkan,

¹⁷Peace Corps Volunteer Handbook 2014 diakses dari, http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/documents/volunteer_handbook.pdf hal 23, pada tanggal 30 Februari 2017

¹⁸Alan Dessoiff, "Building Partnerships: INDONESIA AND THE UNITED STATES".International Educator, 2011. Vol. 20, Hal 39

Pemerintah AS menyadari dengan dilaksanakannya kerjasama komprehensif melalui Program PC dapat menciptakan serta meningkatkan *mutual understanding*. Maka dari itu, kerjasama yang dijalin oleh kedua belah pihak dapat memberikan keuntungan dua arah.

Namun, Pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan cukup terbelakang dibandingkan negara maju lainnya, khususnya Asia Tenggara. Realitas tersebut memicu Indonesia untuk terus berupaya dan berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.¹⁹ Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang belum dapat terselesaikan secara menyeluruh. Tingginya biaya menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Dewasa ini, masih banyak anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan wajib dasar 12 tahun. Pendidikan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat menengah keatas, sedangkan masyarakat miskin belum dapat memperoleh kesempatan pendidikan dikarenakan minimnya pendanaan dari pemerintah. Kurangnya pemerataan terhadap pendanaan oleh pemerintah Indonesia terhadap daerah-daerah terpencil, sehingga terjadi kesenjangan biaya pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan.²⁰

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan juga menjadi agenda penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya akses pendidikan hanya diperoleh oleh masyarakat wilayah

¹⁹Yohannie Lingasari, "Riset Indonesia Tertinggal Dibandingkan Negara di Asia Tenggara" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150527192704-20-56125/riset-indonesia-tertinggal-dibanding-negara-di-asia-tenggara/> pada tanggal 15 Oktober 2017

²⁰Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan, op cit.,hal 3

perkotaan sedangkan masyarakat wilayah pedesaan atau pelosok belum dapat memperoleh akses pendidikan tersebut.²¹ Disamping itu, infrastruktur yang kurang memadai menghambat proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah menyadari infrastruktur di Indonesia belum mengalami pembangunan secara menyeluruh.²²

Permasalahan yang sangat perlu diperhatikan adalah kurikulum sekolah. Diperlukan pemerataan kurikulum di seluruh wilayah. Dewasa ini, wilayah pedesaan masih tertinggal jauh dibandingkan wilayah perkotaan hal tersebut dikarenakan minimnya layanan serta akses pendidikan oleh pemerintah. Disamping itu, diperlukan pengajaran bagi guru-guru secara maksimal untuk dapat melakukan pengajaran terhadap murid secara optimal.²³

Pemerintah Indonesia mengharapkan dengan disepakatinya kerjasama komprehensif yang direalisasikan dalam program PC dapat membantu permasalahan dalam bidang pendidikan Indonesia, khususnya mutu pengajaran Bahasa Inggris. Sedangkan, Pemerintah AS mengharapkan dengan pelaksanaan program PC dapat menciptakan *mutual understanding*, sekaligus membantu problematika pendidikan dengan menggunakan implementasi-implementasi yang

²¹Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan, op cit.,hal 4

²²Rakhmat Nur, "Pembangunan Infrastruktur Pendidikan" diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/12000161/mendagri.minta.pemda.bangun.infrastruktur.pendidikan.yang.memadai> pada tanggal 15 Oktober 2017

²³Sujarwo, "Pendidikan Di Indonesia Memprihatinkan", Unioversitas Negeri Yogyakarta 2013. Hal 2-3

telah dicanangkan oleh PC. Hal tersebut diupayakan dalam mencapai kepentingan nasional dari kedua belah pihak.²⁴

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah, penelitian diawali pada tahun 2009 pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama periode pertama beserta dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua, dimana diadakannya pertemuan antara AS dengan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2009 di Indonesia yang membahas pembentukan kembali program PC. Pertemuan tersebut membahas kesiapan AS dalam pengiriman para relawan PC ke Indonesia sebagai bentuk kerjasama komprehensif yang telah dicanangkan.²⁵ Selanjutnya, penelitian diakhiri pada tahun 2016 pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama periode kedua dan Presiden Jokowi pada periode pertama.

Pembahasan mencakup mengenai upaya diplomasi publik AS yang direalisasikan dalam bentuk kerjasama komprehensif. Kerjasama komprehensif tersebut diwujudkan dalam program PC yang bertujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pengajaran Bahasa Inggris. Penulis tidak memilih semua lokasi yang telah di dicanangkan oleh PC. Namun, memilih salah satu dari tiga wilayah yaitu wilayah Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan penulis melihat program PC di Jawa Barat memiliki

²⁴RI-AS sepakati kerjasama Peace Corps dan Interfaith dialogue, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/RI-AS-Sepakati-Kerjasama-i-Peace-Corps-i-dan-i-Interfaith-Dialogue-i.aspx> pada tanggal 30 Februari 2017

²⁵Laporan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia tahun 2015, op cit., hal 5

kegiatan-kegiatan yang beragam dan bervariasi, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap diplomasi publik AS melalui peningkatan mutu pendidikan, khususnya pengajaran Bahasa Inggris.²⁶

1.2.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian dirumuskan sebagai “**Bagaimana Diplomasi Publik AS melalui implementasi-implementasi program *Peace Corps* dalam meningkatkan pemahaman bersama?**”

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi-implementasi program *Peace Corps* melalui diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam meningkatkan pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara kedua belah pihak

1.3.1 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi para pengkaji Ilmu Hubungan Internasional maupun peneliti yang membahas peranan aktivitas diplomasi publik AS melalui program PC yang direalisasikan di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui upaya kerjasama komprehensif antara AS dengan Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Diharapkan hal ini dapat menjadi sebuah pemasukan baru bagi Ilmu Hubungan Internasional.

²⁶Ibid., hal 6

1.4 Kajian Literatur

Dalam tulisan ini akan dibahas berbagai literatur yang telah menjadi *public domain* dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kajian literatur pertama, diambil dari jurnal CPD Perspective on Public Diplomacy yang ditulis oleh Kathy R. Fitzpatrick dari Public Relations & Advertising De Paul dengan judul “*U.S Public Diplomacy*” yang dipublikasikan pada tahun 2004.²⁷ Dalam artikel ini, dipaparkan bahwa diplomasi publik merupakan upaya bangsa untuk memahami, menginformasikan serta mempengaruhi masyarakat dari negara lain. Diplomasi publik telah dianggap sebagai *International Public Relation* dan yang menjadi tujuan utama dari diplomasi publik AS untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan antara AS dan publik asing. Disamping itu, artikel ini menjelaskan perbedaan antara diplomasi publik dan diplomasi asing. Dimana diplomasi publik mampu menciptakan opini masyarakat asing di suatu negara, sedangkan diplomasi tradisional hanya berfokus pada penyebaran pengaruh terhadap pemimpin negara. Jurnal ini menjelaskan penerapan langkah-langkah diplomasi publik AS melalui *The United States Information and Educational Act* sebagai bentuk pertukaran informasi dan budaya pendidikan AS terhadap negara-negara di dunia.²⁸

Diplomasi publik adalah upaya pertama pemerintah AS dalam meningkatkan *mutual understanding* terhadap publik asing pada tahun 1984. Hal ini menjadikan

²⁷ Kathy R Fitzpatrick. “U.S Public Diplomacy”. *CPD Perspective on Public Diplomacy*, 2004. Vol. 70, no 13, hal 412-416

²⁸ U.S Public Diplomacy. Op cit., hal 412-416

penulis, untuk menggunakan jurnal penelitian ini sebagai salah satu referensi pendukung penelitian. Sebab penulis dapat memahami awal mula diplomasi publik yang direalisasikan oleh AS melalui *The United States Information and Educational Act* yang berfokus terhadap *mutual understanding* yang memiliki persamaan konsep dengan pembentukan program PC dimana penggunaan diplomasi publik AS yang bertujuan menciptakan pemahaman bersama diantara masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing melalui diplomasi publik. Jurnal ini memberikan informasi serta referensi topik penulis yang akan meneliti program *Peace Corps* pada era masa pemerintahan Barack Obama.²⁹

Artikel berikutnya diambil dari jurnal *Place Branding and Public Diplomacy* yang ditulis oleh Sarah Ellen Graham dari Universitas Southern California dipublikasikan pada tahun 2008 yang berjudul "*US public diplomacy in the Asia Pacific: Opportunities and challenges in a time of transition*".³⁰ Artikel ini menjelaskan kebijakan AS terhadap diplomasi publik serta adanya perdebatan diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Asia Pasifik. Mengingat bahwa penggunaan *soft power* sangat penting dalam kepentingan ekonomi strategis yang telah menunjukkan bahwa penggunaan *hard power* sudah tidak terlalu efisien. Ia membahas empat bagian, yang pertama adalah pembahasan mengenai perdebatan kontemporer serta pengaturan diplomasi publik AS. Selanjutnya, bagian kedua penguraian tiga kunci komponen dari diplomasi publik AS. Kemudian, bagian ketiga pembahasan mengenai struktur birokrasi melalui diplomasi publik AS yang

²⁹ *Ibid*

³⁰ Sarah Ellen Graham. "*US public diplomacy in the Asia Pacific: Opportunities and challenges in a time of transition*". *Place and Public Diplomacy Branding* Vol 4, hal 336-356

telah dirancang dan diimplementasikan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai pandangan penulis artikel ini mengenai masa depan diplomasi publik AS di Asia Pasifik dalam konteks transisi geopolitik regional serta menekankan potensi kontribusi diplomasi publik AS dalam kepentingan AS.³¹

Perananan diplomasi publik sangat efektif dalam penenganan perang Irak dan peristiwa 9/11. Yang dimana pasca peristiwa tersebut menunjukkan adanya suatu tantangan kebijakan luar negeri yang paling beragam dan membingungkan yang dihadapi oleh pemerintah. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah AS dalam pelaksanaan diplomasi publik berkisar 1 miliar dolar Amerika per tahun. Namun yang perlu dilihat adalah upaya AS dalam program yang telah dicanangkan yang bertujuan untuk memfasilitasi kebijakan luar negeri AS. Disamping itu adanya penurunan legitimasi Amerika Serikat yang berbanding terbalik dengan peningkatan Cina yang telah menciptakan lingkungan yang tidak terduga bagi kebijakan luar negeri AS di kawasan Asia Pasifik, terutama berkaitan dalam bidang keamanan. Adanya pergeseran yang bersifat normatif berdampak pada pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bebas dan memiliki kesadaran diantara pemimpin regional dan publik yang dapat mempersulit AS dalam pelaksanaan kepentingannya di berbagai bidang. Munculnya Asia Timur dalam hal diplomatik dan ekonomi memiliki implikasi yang signifikan bagi pengaruh perkembangan AS.³²

³¹ *Ibid*

³² US public diplomacy in the Asia Pacific. Op cit., hal 336-356

Opini publik yang cenderung negatif, bahkan terbentuk di Australia yang merupakan aliansi terdekat AS hal tersebut dikarenakan adanya insiden perang di Irak yang menyebabkan beberapa komentar yang timbul bahwa Amerika Serikat mungkin akan menghadapi kesulitan dalam penggalangan dukungan Canberra terhadap kebijakan kontroversial di masa depan.³³ Terkait dengan peristiwa maupun konflik yang terjadi di seluruh kawasan Asia tersebut mendorong AS melakukan suatu diplomasi publik. Diplomasi publik merupakan sebuah upaya dalam melengkapi serta memberikan kesempatan secara efektif dalam mengukur sentimen publik di luar negeri terhadap Amerika Serikat.³⁴ Bagi penulis, artikel tersebut membantu penulis dalam mengetahui bahwa adanya aktivitas diplomasi publik dalam pendekatan AS terhadap negara asing. Disamping itu, penggunaan diplomasi publik dengan menggunakan *soft power* lebih efektif dibandingkan penggunaan *hard power* yang berakibat negatif yang berujung dengan tindak kekerasan maupun anarkis. Maka dari itu dalam penulis menyadari bahwa pentingnya diplomasi publik dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang diwujudkan dalam program Peace Corps. Namun penulis, menyadari bahwa kekurangan dari artikel ini tidak membahas diplomasi publik yang direalisasikan melalui program-program Amerika Serikat.³⁵

Kajian literatur yang terakhir diambil dari buku yang ditulis oleh Nicholas J. Cull (2010) yang berjudul “*Public Diplomacy: Seven Lesson for its Future From*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ US public diplomacy in the Asia Pacific. Op cit., hal 336-356

its Past".³⁶ Buku ini menjelaskan tujuan serta pengertian dari adanya diplomasi publik. Dipaparkan juga mengenai praktik utama dalam aktivitas diplomasi publik adalah *listening, advocacy, cultural and exchange diplomacy & international broadcasting*. Disamping itu, menjelaskan mengenai diplomasi publik sebagai sejarah baru dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang menampilkan peran masyarakat dalam urusan kenegaraan. Adanya mekanisme komunikasi juga menjadi syarat utama dalam peranan diplomasi publik.

Dalam artikel ini Nicholas berpendapat bahwa diplomasi publik memiliki peranan dua arah yaitu memfasilitasi keterlibatan publik terhadap urusan kenegaraan serta *a process of mutual influence*.³⁷ Kedua hal tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu membangun opini publik. Selain itu, artikel ini membahas secara mendalam mengenai peranan diplomasi publik yaitu yang pertama adalah diplomasi publik sebagai media pendengar (*listening*), diplomasi publik yang terbaik adalah dengan mendengarkan opini publik, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengumpulkan serta menganalisis pendapat publik asing.³⁸

Peranan diplomasi publik yang kedua adalah bahwa diplomasi publik harus berpengaruh terhadap sebuah bentuk kebijakan. Dalam hal ini diplomasi publik yang baik, tidak hanya dengan apa yang pemerintah ucapkan melainkan apa yang akan pemerintah lakukan terhadap negaranya. Konteks politik dalam penerapan

³⁶ Nicholas J. Cull, "*Public Diplomacy: Seven Lesson for its Future From its Past*". Figueroa Press, Los Angeles, 2010. Vol. No 1, hal 11-17

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Public Diplomacy: Seven Lesson for its Future From its Past*. Op cit., hal 11-17

diplomasi publik hanya berhasil terukur dalam setiap pembentukan kebijakan dan tidak hanya retorika semata.

Peranan diplomasi yang ke-tiga adalah efektivitas diplomasi membutuhkan suatu kredibilitas dan impikasi. Peranan yang ke-empat adalah diplomasi publik tidak memiliki satu suara, dalam hal ini dikatakan bahwa suara terbanyak adalah yang paling kredibel. Kemudian peranan diplomasi publik yang terakhir adalah diplomasi publik tidak hanya tentang “anda” namun diplomasi publik umumnya adalah tentang memajukan kebijakan asing.³⁹

Bagi penulis, jurnal ini membahas kajian diplomasi publik secara sangat sistematis dan memberikan referensi yang bermanfaat bagi penelitian penulis. Jurnal ini dapat mendeskripsikan konseptualisasi dari diplomasi publik, yang tidak hanya untuk menyampaikan komunikasi dua arah terhadap publik melainkan memperkenalkan ide, gagasan dan pesan terhadap publik. Pembahasan sangat efektif untuk dikaji penulis sebagaimana berkaitan dengan topik yang penulis ajukan.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa, kajian literatur pertama menjelaskan mengenai diplomasi publik melalui jalur pendidikan dan budaya. Kedua, kegiatan diplomasi publik melalui jalur bisnis atau ekonomi. Kajian literatur yang terakhir, menjelaskan mengenai peran media dan teknologi sangat berpengaruh dalam setiap aktivitas diplomasi publik. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa diplomasi tradisional dianggap tidak cukup berperan besar

³⁹*Ibid*

dalam melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat. Diperlukan pendekatan diplomasi publik yang bersifat informal dan fleksibel sehingga pendekatan dapat dilakukan melalui berbagai jalur.

1.5 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan suatu hubungan antar negara yang disetiap aspek pelaksanaannya diprakarsai oleh aktor negara maupun aktor *non-negara* dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara dapat dicapai dengan menjalin hubungan kerjasama *bilateral*, *multilateral* maupun *trilateral* sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap satu sama lain.⁴⁰ Disamping itu, meningkatnya hubungan kerjasama akan menimbulkan sikap ketergantungan satu sama lain, sehingga dapat mengurangi konflik antar negara. Dengan kata lain penggunaan *Hard Power* dalam pencapaian kepentingan nasional suatu negara telah bergeser menjadi *Soft Power* yang lebih mengutamakan kerjasama serta bentuk diplomasi dalam setiap penyelesaian konflik..⁴¹

Dalam ilmu hubungan internasional, setiap negara akan memiliki rasa beketergantungan, dikarenakan ketakutan terhadap stabilitas negara. Dijalinya hubungan kerjasama *bilateral*, *multilateral*, maupun *trilateral* antar negara bertujuan untuk menciptakan suatu komunikasi lintas bangsa dan mewujudkan tatanan global yang damai dan sejahtera. Dengan adanya hubungan internasional

⁴⁰ Robert Jackson "Introduction to International Relations: Theories and Approaches" hal 106-107

⁴¹ Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Op cit., hal 106-107

setiap negara dapat saling melengkapi kebutuhan warga negaranya yang sekiranya belum dapat terpenuhi.⁴²

Peace Corps merupakan bentuk kerjasama *bilateral* antara AS dengan Indonesia. Kerjasama bilateral direalisasikan dalam meningkatkan hubungan internasional sehingga dapat memenuhi kepentingan nasional yang bersifat resiprokal yaitu memberikan keuntungan terhadap dua belah pihak. Pemerintah AS merealisasikan Program PC di Indonesia untuk mencapai mutual understanding. Disamping itu, dengan mengimplementasikan program PC dengan menggunakan instrumen pendidikan akan memberikan keuntungan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Kerjasama yang dilaksanakan AS-Indonesia dalam kerangka comprehensive partnership bersifat saling ketergantungan, dimana kedua negara dapat saling mencapai kepentingannya. Penjelasan mengenai program PC terkait dengan konsep liberalisme interdependensi yang menyatakan bahwa diperlukannya suatu kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional, sehingga dengan dijalinnya hubungan kerjasama secara terus menerus akan memberikan rasa ketergantungan satu sama lain. Disamping itu, dengan adanya kerjasama maka dapat mengurangi konflik antar negara, sehingga penggunaan *Hard Power* dalam pencapaian kepentingan nasional telah beralih menjadi kepada pendekatan *Soft Power* yang mengutamakan diplomasi dan kerjasama.⁴³

⁴²Kammas hadi. "hubungan internasional dan organisasi internasional," diakses dari <http://manalor.files.wordpress.com/2011/01/1-modul-hubungan-internasional.pdf> diakses pada 30 februari 2017

⁴³ *Ibid.*,

Ilmu Hubungan internasional identik dengan isu-isu tradisional seperti halnya isu keamanan negara dan politik yang seringkali dilaksanakan sebagai instrumen politik, militer serta diplomasi suatu negara. Namun pada era informasi secara pesat, menciptakan paradigma baru dalam ilmu hubungan internasional. Bahwa ilmu hubungan internasional tidak hanya ilmu yang memusatkan pada hubungan antar negara melainkan aktor non- Negara merupakan entitas signifikan dalam ilmu hubungan internasional yang sudah tidak dapat diabaikan lagi. Peran dari kebijakan suatu negara sangat diutamakan dalam mewujudkan suatu hubungan antar negara dan aktor lainnya, dikarenakan kebijakan suatu negara merupakan bentuk implementasi dari politik luar negeri. Politik luar negeri yang dijalankan suatu negara sangat relevan dengan pelaksanaan aktivitas diplomasi suatu negara.⁴⁴

Diplomasi merupakan suatu bentuk instrumen dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Namun dahulu negara hanya mengenal diplomasi sebagai suatu aplikasi intelijen dan taktik dalam mewujudkan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat. Disamping itu, aktor diplomasi didefinisikan oleh Satow adalah diplomasi dengan aktor pemerintah saja. Seiring berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) praktik diplomasi mampu menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antar Negara di seluruh dunia.⁴⁵ Maka peranan konvensional atau tradisional tidak cukup untuk dijalankan, pemerintah tidak dapat berupaya sendiri sebagai aktor namun membutuhkan aktor

⁴⁴Paul R. Viotti & Mark & Mark V. Kauppi "International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond". Boston: Allyn and Bacon, 1991. Hal 1-7

⁴⁵Sir Ernest Satow. 1992. A Guide to Diplomatic Practice. New York: Longman Green & Co, hal 1

non- pemerintahan yang secara umum dikenal sebagai diplomasi publik. Oleh sebab itu berakhirnya perang dunia kedua menyebabkan bergesernya suatu bentuk diplomasi tradisional dan dengan adanya perkembangan situasi global, aktor, dan teknologi informasi berhasil menghadirkan konsep diplomasi modern.

Keberadaan diplomasi dapat digolongkan menjadi dua jalur utama yaitu diplomasi jalur pertama (*track one*) dan diplomasi jalur kedua (*track two*). Pada umumnya diplomasi jalur pertama tidak jauh berbeda dengan diplomasi tradisional, yaitu dengan adanya hubungan antar pemerintah dan aktor utama dalam diplomasi jalur pertama adalah Negara resmi. Sedangkan pada diplomasi jalur kedua dikenal dengan *citizen diplomacy* dikarenakan aktor yang terlibat tidak hanya Negara melainkan aktor non-negara, bersifat informal dan sangat fleksibel dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, peran diplomasi jalur kedua tidak menggantikan peran diplomasi jalur pertama namun untuk mendukung dan memperkuat diplomasi jalur pertama.⁴⁶

Dewasa ini, hubungan antar negara tidak lagi menjadi satu – satunya kajian dalam permasalahan hubungan internasional. Namun terdapat aktor non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat serta media mulai mengambil peranan penting dalam ilmu hubungan internasional.⁴⁷ Aktor non pemerintahan tersebut dikenal dengan istilah diplomasi jalur kedua yang kemudian dikembangkan menjadi sembilan jalur atau disebut dengan diplomasi multijalur.

⁴⁶Djelantik,S. 2008. Diplomasi Antara Teori dan Praktik: Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 19-20

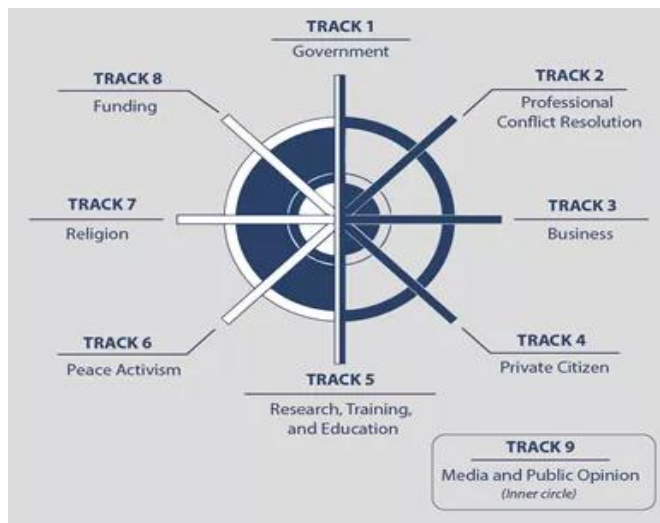
⁴⁷Ibid., hal 21

Diplomasi multijalur dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald dengan melakukan perluasan dari diplomasi jalur pertama yang hanya dilaksanakan oleh aktor resmi pemerintah. Diplomasi multijalur menurut McDonald, menggunakan pendekatan dua jalur menjadi empat jalur (warga sipil, bisnis, para ahli penyelesaian konflik dan media) namun pada tahun 1991 dikembangkan menjadi empat jalur tambahan yaitu jalur agama, aktivis, penelitian, pelatihan dan pendidikan) sehingga secara keseluruhan *multitrack diplomacy* terdiri dari sembilan jalur. Jalur ini juga menggantikan pendekatan hierarkis dalam upaya meresolusi sebuah konflik dengan menggunakan pendekatan kompas yang dapat menunjukkan hubungan antara semua jalur dan lintasan yang masing – masing memiliki pendekatan sumber daya, nilai dan sebagai pendekatan perdamaian.⁴⁸ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diplomasi jalur kedua tetap mendukung diplomasi jalur pertama, dan tidak menggantikan peranan negara sebagai aktor utama dalam kajian ilmu hubungan internasional.

Konsep diplomasi publik dalam implementasi-implementasi program dapat dilihat dalam penggunaan diplomasi multijalur kelima yaitu Research, Training and Education yang berkaitan dengan pelaksanaan PC di Indonesia. Disamping itu, peran pemerintah sebagai *Track One* (Jalur Pertama) tidak digantikan oleh *Track Two* namun saling melengkapi dan mendukung. PC merupakan perwujudan bahwa implementasi-implementasi program merupakan salah satu bentuk diplomasi publik, sehingga dijelaskan adanya aktor negara maupun aktor *non-negara*..

⁴⁸Institute for Multi-Track Diplomacy, What is Multi-Track Diplomacy diakses dari <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/> pada 11 Oktober 2017.

1.1 Gambar: Skema Sembilan Jalur dalam Diplomasi Multijalur



Sumber: <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/> pada tanggal 15 Oktober 2017⁴⁹

Dengan konsep diplomasi publik yang telah direalisasikan dalam program PC, menunjukkan konsep yang bersifat fleksibel dalam setiap pelaksanaannya tanpa menyampingkan profesionalitas dalam program PC. Disamping itu, walaupun PC sebuah program dibawah pemerintahan AS, namun pemerintah Indonesia tidak menjadikannya tertuju terhadap pada permasalahan formal negara melainkan diwujudkan serta diimplementasikan terhadap masyarakat.

Pendidikan merupakan proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi pendidikan antara yang mendidik dan yang dididik. Melalui masukan-masukan kepada peserta didik yang secara sadar akan dicerna oleh jiwa, akal maupun raganya sehingga pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) akan sesuai dengan yang dituju

⁴⁹*Ibid*

oleh pendidikan tersebut. Dalam bidang pendidikan, manusia merupakan sasaran atau subjek utama dalam mengembangkan setiap potensi-potensi yang ada dalam diri sendiri. Pemahaman dari pendidik terhadap potensi-potensi dan sifat hakikat manusia sangat penting agar pendidikan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memanusiakan manusia. Pendidikan harus diarahkan kepada pencapaian tujuan itu melalui perumusan dan penerapan konsep pendidikan.⁵⁰

Maka, pada hakikatnya manusia menyadari bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam pengembangan potensi diri. Potensi setiap individu memberikan peran penting dalam meningkatkan pembangunan suatu negara. Pemerintah menyadari bahwa dengan adanya pendidikan yang berkualitas akan melahirkan potensi-potensi bangsa yang akan membawa Indonesia yang lebih maju.

Konsep pendidikan terhadap program PC sangat erat kaitannya, karena diplomasi publik AS diimplementasikan melalui instrumen pendidikan. Dijelaskan bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam pengembangan potensi diri, sehingga dapat saling berpengaruh antara individu maupun kelompok masyarakat. Pendidikan melahirkan potensi-potensi bangsa, sehingga perlu diperhatikan pendidikan pada usia dini. Program PC memberikan pengajaran Bahasa Inggris untuk melakukan peningkatan mutu Bahasa Inggris terhadap usia dini dan sekaligus menciptakan pemahaman yang baik antara dua belah pihak.

⁵⁰Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, edisi kedua, hal 11

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni sebuah proses pemahaman yang didasarkan pada perbedaan tradisi-tradisi metodologis pada penelitian yang membahas persoalan sosial atau manusia. Penulis akan menggunakan bentuk data studi dokumen. Data yang diperoleh tersebut lalu diolah dan diselaraskan sehingga dapat menjadi sebuah penelitian yang baik.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Penulis akan menggunakan data dari hasil wawancara serta sumber studi pustaka yang berasal dari buku, dokumen, literatur dan pemberitaan internet.

1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan diuraikan sebanyak 4 bab yaitu sebagai berikut, bab 1 akan menguraikan latar belakang, kerangka pemikiran, studi literatur, serta identifikasi dari masalah yang akan diteliti. Bab 2 akan membahas mengenai sistematika pendidikan di Indonesia, kemudian akan dipaparkan mengenai kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pada sub bab terakhir akan dijelaskan mengenai tantangan dan hambatan dalam proses pendidikan serta upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya bab 3 akan menjelaskan mengenai upaya-upaya diplomasi publik AS melalui program Peace Corps dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, akan dipaparkan mengenai kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh *Peace Corps* dalam melancarkan diplomasi publik AS di Indonesia. Kemudian akan dijelaskan mengenai pengkajian data-data yang menguraikan konsep diplomasi publik atas adanya pengimplementasian program PC di Indonesia. Selanjutnya, akan dipaparkan analisis penulis mengenai aktivitas diplomasi publik yang sudah diterapkan Amerika Serikat melalui program Peace Corps. Pada sub bab terakhir akan dijelaskan mengenai konsep diplomasi multijalur oleh Mc. Donald mengenai penggunaan jalur kelima yaitu (*research, training, and education*) serta jalur ke sembilan yaitu media dan komunikasi dalam mendukung program PC di Indonesia. Dan pada bab ke 4 kesimpulan.